

ABSTRAK

Kabupaten Sidoarjo masih mempunyai fasilitas kesehatan yang belum mampu memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan sesuai prosedur yang di berlakukan. Pelayanan yang kurang baik dilihat dari beberapa prosedur pelaksanaan yang di dapat oleh pasien peserta JKN Jaminan Kesehatan Nasional. Masih adanya pelayanan yang di berikan antara fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan medis berupa masih adanya pengeluaran pembiayaan tambahan dalam menebus obat, penambahan biaya untuk melakukan test labolatorium, kurangnya tindakan cepat dan tanggap dalam memeriksa pasien JKN PBI, dan prosedur adsmintrasi yang lama dan antrian panjang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atau pemulihan kesehatan. Dalam beberapa fasilitas kesehatan mempunyai perbedaan dalam hal memberikan pelayanan kesehatan. Walaupun semua keluhan atas pelaksanaan pelayanan kesehatan sudah mencoba di tanggulangi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan perluasan fasilitas kesehatan, dan upaya kesepakatan yang terseleggara antara Bupati dan Kepala BPJS Sidoarjo dengan menjadikan Kabupaten Sidoarjo menjadi UHC capain peserta 95% akhir tahun 2018 dari total jumlah penduduk. Hal tersebut belum mampu memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai standart yang sudah ditentukan. Progam JKN merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk mampu dilaksanakan oleh pemerintah Daerah. UU No 40 Tahun 2004 merupakan UU SJSN dengan mengatur Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mencakup progam JKN dengan diselenggarakan oleh BPJS. Peneliti menggunakan Teori Esping Anderson studi komparatif dalam tipologi universal welfare state guna menjawab relasi Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta dan peran Pemerintah Daerah dalam kebijakan progam JKN-PBI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data didapat oleh penelitian secara mendalam dan menyeluruh dengan metode purpose.

Kata Kunci: Progam JKN, Distribusi Kewenangan, Peran Pemerintah Daerah dan Rumah Swasta, Pelayanan Kesehatan.

ABSTRACT

Sidoarjo district health facilities still have not been able to provide good health care and according to the procedures enacted. Service less good views of several procedures that can be patient participants in the National Health Insurance JKN. There are still services provided by health facilities in providing medical services in the form of additional financing expenditures in redeeming drugs, additional costs for conducting laboratory tests, lack of prompt and responsive action in examining patients of JKN-PBI and old administration procedures and long queues for conduct medical examinations or restore health. Some health facilities have differences in terms of providing health services. Although all complaints on the implementation of health services have been tried to be tackled by the local government of Sidoarjo regency with the expansion of health facilities, and the effort of agreement between the Regent and Head of BPJS Sidoarjo by making Sidoarjo District become UHC participants 95% by 2018 from the total population. It has not been able to provide health services in accordance with predetermined standards. Program JKN is a central government policy to be able to be implemented by local government. No. 40 of 2004 is the SJSN Law by regulating the National Social Security System which includes the JKN program organized by BPJS. The researchers used the Theory of Esping Anderson comparative study in the universal welfare state typology to answer the relation of Government and Private Hospital and the role of Local Government in the policy of JKN-PBI program. This research uses descriptive qualitative method, and data collection obtained by research in depth and comprehensive with purpose method.

Keyword: Program JKN, Power Distribusi, The Role of Local Government and Private Home, Health Services.